Easta Journal of Innovative Community Services
Vol. 5, No. 01, Oktober 2026, pp. 120-136
ISSN: 2985-6159, DOI: 10.58812/ejincs.v5i01

Penguatan Literasi Ekonomi Regional melalui FGD *Review* Perekonomian Papua 2024 dan *Outlook* 2025

Entar Sutisman[1]*, Pisi Bethania Titalessy[2], Siti Mariani[3], Adriani Lande[4], Ismail Noy[5], Fajar Rina Sejati[6], Herry Adi Setya Wibowo[7]
[1,3,4,5,6] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia, [2] Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia, [7] Jurusan Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Merauke, Indonesia
**Corresponding author*
E-mail: entar.uniyap@gmail.com (Entar Sutisman)*

Article History:
Received: October, 2026
Revised: October, 2026
Accepted: October, 2026

***Abstract**: Kegiatan pengabdian ini bertujuan memfasilitasi literasi ekonomi regional melalui FGD Review Perekonomian Papua 2024 dan Outlook 2025. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Desember 2024 di Gedung Keuangan Negara Jayapura dengan narasumber dari Universitas Yapis Papua dan Universitas Cenderawasih, serta peserta dari pemerintah, perbankan, KADIN, akademisi, dan institusi terkait. Metode partisipatif mencakup paparan awal, diseminasi materi, dialog lintas institusi, dan sintesis isu; evaluasi dilakukan secara dokumentatif dan reflektif. Luaran yang dilaporkan berupa pertukaran pengetahuan dan sintesis enam kelompok isu: cakupan serta periode data; pertumbuhan, inflasi, dan risiko outlook; kualitas belanja; kredit dan pembiayaan UMKM; diversifikasi, sumber daya manusia, dan konektivitas; serta investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pembangunan inklusif. Peta isu disajikan sebagai sintesis penulis, bukan keputusan kebijakan formal. Kegiatan membuka ruang interpretasi bersama, tetapi peningkatan pengetahuan peserta belum dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pre-test dan post-test. Penyusunan policy note, pemantauan penggunaan tiga bulan setelah hasil dibagikan, dan forum semesteran dirumuskan sebagai usulan keberlanjutan. Proses FGD relevan untuk dibahas melalui kerangka knowledge co-production dengan manfaat yang dibatasi pada fasilitasi dan pertukaran pengetahuan.*

Keywords: *Ekonomi Regional; FGD; Kolaborasi Pemangku Kepentingan; Literasi Ekonomi; Papua*

Pendahuluan

Papua merupakan wilayah yang membutuhkan pembacaan ekonomi secara kontekstual karena struktur produksi, kondisi geografis, konektivitas antardaerah, dan capaian kesejahteraan tidak selalu bergerak seragam. Pada saat FGD diselenggarakan, laporan Bank Indonesia edisi November 2024 telah mencatat pertumbuhan perekonomian Wilayah Papua pada triwulan III-2024 sebesar 1,66

persen (*yoy*), melambat dari 4,37 persen pada triwulan sebelumnya, terutama akibat kontraksi pertambangan dan penggalian serta perlambatan beberapa sektor nontambang (Bank Indonesia, 2024). Sebagai konteks tambahan setelah kegiatan, data Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada 6 Februari 2025 menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Papua sepanjang 2024 tumbuh 4,11 persen dengan PDRB atas dasar harga berlaku Rp85,91 triliun dan PDRB per kapita Rp81,01 juta (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2025). Data yang terbit setelah kegiatan tersebut digunakan dalam penulisan naskah, bukan sebagai informasi yang telah tersedia pada FGD 13 Desember 2024. Perbedaan cakupan antara istilah "Wilayah Papua" dan "Provinsi Papua" menegaskan bahwa literasi data regional harus menjelaskan unit wilayah, periode, sumber pertumbuhan, dan implikasinya bagi kesejahteraan. Literatur tentang Papua juga menunjukkan bahwa kualitas belanja publik, kapasitas fiskal, kondisi geografis, pendidikan, infrastruktur, dan distribusi manfaat pembangunan saling berkaitan (Fatahillah et al., 2021; Saktina & Khoirunnurrofik, 2022; Titalessy et al., 2024).

Masalah utama komunitas sasaran bukan semata keterbatasan informasi ekonomi, melainkan fragmentasi cara membaca data yang berasal dari institusi berbeda. Pertumbuhan, inflasi, fiskal, perbankan, kemiskinan, infrastruktur, dan pembangunan manusia menggunakan cakupan dan periode yang tidak selalu identik sehingga memerlukan interpretasi sebelum menjadi dasar keputusan. (Andriaswati & Utami, 2022) menunjukkan bahwa pendidikan dan transfer fiskal mempunyai keterkaitan penting dengan kemiskinan di Papua, sementara (Rumere et al., 2022) menunjukkan bahwa besarnya skema otonomi khusus belum otomatis menjamin capaian pendidikan dan kesehatan tanpa desain belanja yang efektif. (Titalessy & Situmeang, 2024) juga menemukan bahwa komponen belanja transfer tertentu lebih kuat keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif. Dengan demikian, kebutuhan komunitas sasaran adalah kemampuan menghubungkan indikator makro dengan pertanyaan kebijakan: sektor apa yang mendorong pertumbuhan, apakah manfaat pertumbuhan tersebar, bagaimana transmisi belanja pemerintah, dan bagaimana perbankan serta dunia usaha merespons. Isu ini berkaitan dengan SDG 8, SDG 10, SDG 16, dan SDG 17.

Kesenjangan utama terletak antara ketersediaan data dan kapasitas kolektif untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Seminar satu arah cenderung menghasilkan transfer informasi, tetapi belum tentu menghasilkan validasi silang, pengayaan konteks, atau kepemilikan bersama terhadap masalah. (Reed et al., 2018) menegaskan bahwa kualitas partisipasi dipengaruhi konteks sosial-institusional, desain proses, dinamika kekuasaan, nilai peserta, dan skala isu.

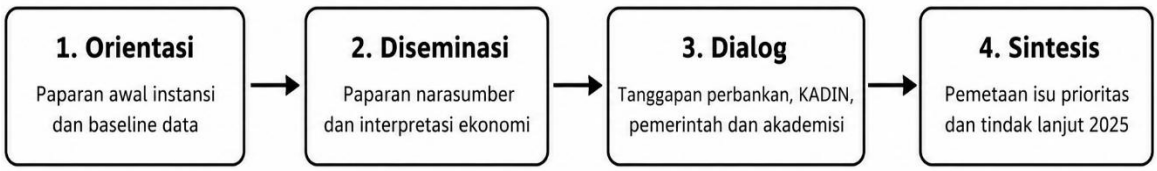
Sementara itu, produksi pengetahuan bersama (*knowledge co-production*) memandang pengetahuan kebijakan sebagai hasil interaksi antara bukti ilmiah dan pengetahuan praktis; kualitasnya meningkat ketika proses bersifat kontekstual, plural, berorientasi tujuan, dan interaktif (Norström et al., 2020). Kerangka *5Ws co-production* juga menekankan pentingnya kejelasan siapa yang terlibat, kapan keterlibatan terjadi, apa yang diproduksi bersama, mengapa kolaborasi dilakukan, dan di mana konteksnya berlangsung (Steiner et al., 2023). Karena itu, FGD lintas pemangku kepentingan dipilih untuk mempertemukan data acuan kelembagaan, analisis akademik, serta pengalaman perbankan, KADIN, pemerintah, dan institusi terkait.

Pengabdian ini bertujuan memfasilitasi pembacaan perkembangan ekonomi Papua sepanjang 2024 dan isu kunci *outlook* 2025; membuka ruang interpretasi bersama untuk menghubungkan indikator makroekonomi, fiskal, perbankan, dan kesejahteraan; membangun dialog akademik-praktis antara perguruan tinggi, pemerintah, perbankan, KADIN, dan pemangku kepentingan lain; serta memetakan isu yang dapat menjadi bahan koordinasi kebijakan dan agenda pengabdian lanjutan. Kontribusinya terletak pada penerapan FGD sebagai sarana penerjemahan bukti ke dalam diskusi kebijakan regional dan dokumentasi pertukaran pengetahuan lintas institusi. Pendekatan ini relevan dengan hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (*science-policy interface*), yang membahas pembagian tanggung jawab antara peneliti dan aktor kebijakan dalam produksi serta penggunaan pengetahuan (Maas et al., 2022). Dalam konteks pembangunan, kebijakan fiskal, pendidikan, infrastruktur, faktor geografis, dan kualitas implementasi perlu dibaca secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif (Ernawati et al., 2021; Fatahillah et al., 2021; M. I. D. Safitri et al., 2021).

Metode

Kegiatan menggunakan metode pengabdian partisipatif berbasis diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD). Surat undangan resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua menetapkan pelaksanaan pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 10.00 WIT sampai selesai di Gedung Keuangan Negara Jayapura, dengan Entar Sutisman dan Pisi Bethania Titalessy sebagai narasumber (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, 2024). Proses pengabdian dirancang dalam empat tahap: orientasi melalui paparan awal penyelenggara, diseminasi materi oleh narasumber, dialog lintas pemangku kepentingan, dan sintesis isu. Paparan awal berfungsi menyediakan landasan pembahasan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian; sesi narasumber menawarkan interpretasi regional; sesi dialog membuka ruang tanggapan

berdasarkan pengalaman kelembagaan peserta; dan tahap sintesis memetakan isu serta kebutuhan tindak lanjut. Tahap terakhir pada Gambar 1 menunjukkan pemetaan agenda, bukan bukti bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Berbasis FGD

Subjek pengabdian adalah komunitas kebijakan dan ekonomi regional Papua yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berhubungan. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, peserta mencakup perwakilan perbankan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pejabat dan analis dari instansi penyelenggara, akademisi, serta institusi terkait. Penyelenggara berperan sebagai pengelola forum dan penyedia data acuan, narasumber sebagai penghubung pengetahuan, sedangkan peserta berperan sebagai sumber pengetahuan kontekstual dan pemberi umpan balik. Komposisi tersebut membuka kesempatan untuk membandingkan indikator resmi dengan kondisi pembiayaan, aktivitas usaha, implementasi program, dan pengalaman lapangan. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), keterlibatan multiaktor penting karena pengetahuan kebijakan tersebar pada aktor yang berbeda dan kualitas pemecahan masalah dapat didukung oleh pertemuan sumber daya serta perspektif tersebut (Haris et al., 2024; Sitepu & Maulana, 2021).

Materi kegiatan mencakup empat fokus pembacaan data: memperhatikan definisi, cakupan wilayah, periode, dan basis perbandingan indikator ekonomi; menelaah dugaan hubungan sebab-akibat secara hati-hati; menghubungkan kebijakan fiskal dengan pembangunan manusia dan pembangunan inklusif; serta membaca faktor spasial dan kelembagaan dalam menjelaskan biaya pembangunan. Keempat fokus tersebut merupakan isi materi, bukan kemampuan peserta yang telah dinilai. Literatur Papua digunakan sebagai pembanding dalam penafsiran data. Dana otonomi khusus, misalnya, dapat memengaruhi pendapatan per kapita tetapi tidak otomatis memperkuat kapasitas pajak daerah (Fatahillah et al., 2021); capaian pendidikan dan kesehatan juga bergantung pada efektivitas desain pengeluaran (Rumere et al., 2022). Kondisi geografis memoderasi efektivitas pembiayaan infrastruktur jalan (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022), sehingga pembahasan pembangunan perlu memasukkan aksesibilitas dan biaya pelayanan.

Evaluasi kegiatan bersifat dokumentatif dan reflektif melalui surat undangan, materi paparan, catatan tema diskusi, dokumentasi foto, serta pemetaan isu terhadap bukti ilmiah. Capaian dinilai pada tingkat proses dan luaran yang dilaporkan, yaitu terlaksananya paparan awal dan paparan narasumber, keterlibatan peserta lintas institusi, berlangsungnya tanya jawab dan pertukaran perspektif, serta tersajinya sintesis tema pembahasan. Kegiatan tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test*, survei kepuasan terstruktur, atau pemantauan longitudinal. Hasil penilaian pemahaman individual dan penelusuran penggunaan hasil pada tingkat kelembagaan tidak dilaporkan. Karena itu, evaluasi ini tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, penguatan kapasitas kelembagaan, atau dampak kebijakan.

Analisis menggunakan pemetaan isi (*content mapping*) dengan mengelompokkan substansi yang dilaporkan ke dalam tema pertumbuhan, fiskal, sektor keuangan, kemiskinan dan ketimpangan, infrastruktur, pembangunan inklusif, dan tata kelola kolaboratif. Tema kemudian dihubungkan dengan literatur ilmiah dan sumber resmi untuk membahas koherensi interpretasi. Untuk penyajian luaran, tema-tema tersebut diringkas menjadi enam kelompok isu pada Tabel 2. Peta isu tersebut merupakan sintesis dokumentatif penulis atas paparan dan tema diskusi. Istilah isu prioritas merujuk pada kelompok isu yang menjadi perhatian dalam sintesis, bukan urutan kepentingan hasil pemeringkatan formal atau keputusan yang mengikat peserta. Sumber yang terbit setelah kegiatan digunakan sebagai konteks penulisan dan dibedakan dari informasi yang tersedia saat FGD.

Tabel 1. Komposisi Subjek Pengabdian dan Peran dalam FGD

Kelompok Peserta	**Perspektif Utama**	**Peran Dalam Proses Pengabdian**
Instansi penyelenggara dan pemerintah	Fiskal, program, data regional, koordinasi	Menyediakan data acuan laporan dan konteks kebijakan
Perbankan	Kredit, pembiayaan, transaksi, risiko	Menghubungkan indikator makro dengan kondisi intermediasi keuangan
KADIN/dunia usaha	Iklim usaha, permintaan, investasi, logistik	Memberikan konteks riil sektor usaha dan hambatan implementasi
Akademisi	Kerangka teoritis, metode analisis, bukti penelitian	Memfasilitasi interpretasi data dan dialog berbasis bukti

Kelompok Peserta	Perspektif Utama	Peran Dalam Proses Pengabdian
Pemangku kepentingan lain	Informasi sektoral dan pengalaman kelembagaan	Memberi tanggapan dan memperkaya pemetaan isu

Hasil

1. Literasi Data Ekonomi Regional

Paparan "Perkembangan Ekonomi Regional Papua" memfasilitasi interpretasi bersama terhadap indikator ekonomi. Peserta diajak membaca pertumbuhan berdasarkan sumbernya, membandingkan kinerja antarkomponen, dan mendiskusikan risiko yang relevan dengan fungsi kelembagaan masing-masing. Laporan Bank Indonesia edisi November 2024 mencatat pertumbuhan Wilayah Papua pada triwulan III-2024 sebesar 1,66 persen (*yoy*), dengan tekanan dari pertambangan dan penggalian serta ekspor neto. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penahan perlambatan, sementara perkembangan kredit memberikan konteks tambahan bagi pembahasan sektor keuangan (Bank Indonesia, 2024). Pembahasan menghubungkan perubahan sektoral dengan permintaan kredit dan profil risiko bagi perbankan; permintaan, logistik, dan investasi bagi KADIN; serta penerimaan, belanja, dan efektivitas program bagi pemerintah. Manfaat yang dapat dijelaskan ialah tersedianya ruang untuk mempertemukan pembacaan indikator dan pengalaman kelembagaan, tanpa menyimpulkan bahwa seluruh peserta telah mencapai pemahaman yang sama.



Gambar 2. Suasana FGD Lintas Pemangku Kepentingan di Gedung Keuangan Negara Jayapura

2. Perspektif Fiskal dan Pembangunan Inklusif

Paparan awal pejabat instansi penyelenggara menghubungkan laporan fiskal dengan interpretasi akademik. Tema diskusi mencakup besaran anggaran, laju pertumbuhan, efektivitas pengeluaran, efek pengganda, distribusi manfaat, dan hasil pembangunan. Peserta menautkan belanja publik dengan kondisi sektor riil, kapasitas pembiayaan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemerataan. Perbankan dan dunia usaha memberi konteks mengenai transmisi belanja terhadap permintaan, pembiayaan, biaya produksi, dan aktivitas usaha, sedangkan akademisi menghubungkan isu tersebut dengan hasil penelitian. Dalam sintesis penulis, hubungan tersebut diringkas sebagai masukan fiskal, luaran program, hasil kesejahteraan, dan distribusi manfaat. Kerangka pembahasan ini menjadi dasar pengelompokan isu kualitas belanja dan pembangunan inklusif pada Tabel 2; kerangka tersebut tidak membuktikan perubahan kemampuan analitis peserta.



Gambar 3. Paparan Materi Perkembangan Ekonomi Regional Papua oleh Narasumber

3. Kolaborasi Lintas Institusi

Komposisi peserta yang mencakup pemerintah, perbankan, KADIN, akademisi, dan institusi terkait mempertemukan perspektif yang beragam. Pemerintah membawa data fiskal dan program; perbankan membawa informasi kredit, risiko, dan transaksi; KADIN membawa pengetahuan mengenai hambatan usaha, biaya, pasar, dan investasi; akademisi membawa kerangka analisis serta pembanding hasil penelitian. Paparan awal penyelenggara menyediakan data acuan resmi, kemudian narasumber

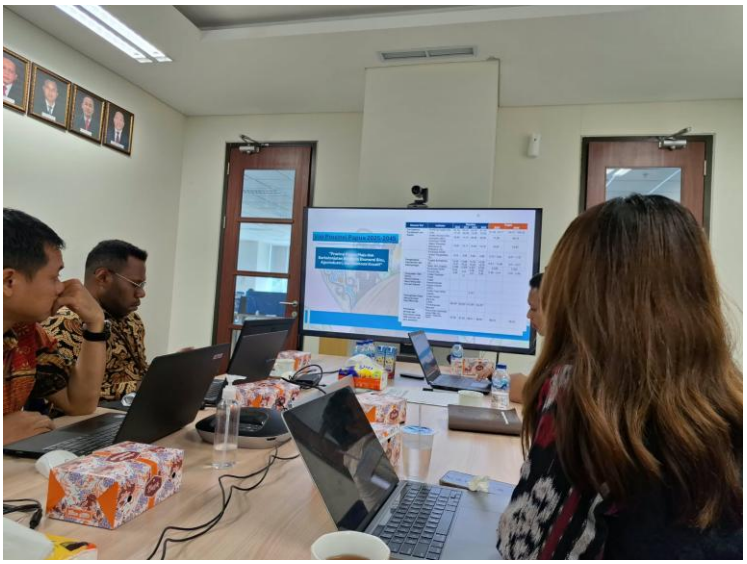
menghubungkannya dengan indikator ekonomi dan literatur, sedangkan peserta menambahkan konteks implementasi. Format meja diskusi dan sesi tanggapan membuka ruang untuk pertanyaan serta perbandingan perspektif. Hasil yang dapat dilaporkan berupa pertukaran pengetahuan mengenai definisi, asumsi, dan isu yang memerlukan penjelasan atau data tambahan. Dokumentasi yang disajikan tidak digunakan untuk menyimpulkan kesamaan pemahaman seluruh peserta atau adanya keputusan kebijakan formal.



Gambar 4. Interaksi Peserta dan Narasumber dalam Pembahasan Lintas Institusi

4. *Outlook* 2025 dan Agenda Jangka Panjang

Salah satu paparan menampilkan Visi Provinsi Papua 2025-2045, sehingga evaluasi 2024 dan *outlook* 2025 ditempatkan dalam horizon pembangunan jangka panjang. Pembahasan mengaitkan respons terhadap perlambatan sektor tertentu dengan diversifikasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, konektivitas, dan pemerataan. *Outlook* diperlakukan sebagai skenario, sehingga asumsi pertumbuhan, harga, produksi, dan kebijakan dapat dibahas melalui pertanyaan "bagaimana jika". Tema yang disintesis meliputi pertumbuhan dan inflasi, kualitas belanja, kredit dan pembiayaan UMKM, investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta pembangunan inklusif. Rincian peta isu dari paparan dan tema diskusi disajikan pada Tabel 2.



Gambar 5. Paparan yang Mengaitkan Evaluasi Ekonomi dengan Visi Provinsi Papua 2025-2045

Tabel 2 memperinci substansi yang dirangkum dari tema kegiatan dan arah pengembangan yang diusulkan penulis. Kolom isu dan substansi menunjukkan isi sintesis; kolom tindak lanjut memuat usulan operasional yang belum dinyatakan sebagai kesepakatan forum. Dengan demikian, luaran dokumentatifnya ialah peta isu yang dapat dibaca dan ditelaah kembali, sedangkan pelaksanaan rekomendasi memerlukan koordinasi berikutnya.

Tabel 2. Peta Isu dari Sintesis Paparan dan Tema Diskusi FGD

Kelompok Isu	**Substansi Dalam Sintesis Kegiatan**	**Arah Tindak Lanjut Yang Diusulkan Penulis**
Cakupan dan periode data	Definisi indikator, wilayah rujukan, periode, dan basis perbandingan perlu diperiksa sebelum angka dihubungkan dengan kebijakan.	Menyusun kamus data berisi indikator, definisi, wilayah, periode, dan sumber.
Pertumbuhan, inflasi, dan risiko *outlook*	Sumber pertumbuhan, perubahan sektor tambang dan nontambang, serta risiko harga dan asumsi proyeksi menjadi tema pemantauan.	Memperbarui ringkasan indikator dan mencatat perubahan asumsi skenario sesuai cakupan wilayah.
Kualitas belanja dan distribusi manfaat	Belanja publik dibahas bersama luaran program, pendidikan, kesehatan,	Menyiapkan pembahasan tematik yang menghubungkan realisasi

Kelompok Isu	Substansi Dalam Sintesis Kegiatan	Arah Tindak Lanjut Yang Diusulkan Penulis
	infrastruktur, kesejahteraan, dan pemerataan.	belanja dengan hasil program dan penerima manfaat.
Kredit, UMKM, dan aktivitas usaha	Kredit, risiko pembiayaan, permintaan usaha, biaya, pasar, dan pembiayaan UMKM menjadi konteks hubungan sektor keuangan dan sektor riil.	Menghimpun kebutuhan data pembiayaan dan masukan perbankan serta dunia usaha untuk forum tematik.
Diversifikasi, SDM, dan konektivitas	Respons jangka pendek dihubungkan dengan diversifikasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas, dan konektivitas.	Mengaitkan ringkasan isu sektoral dengan agenda pembangunan jangka panjang dan kebutuhan data pendukung.
Investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pembangunan inklusif	Investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pemerataan manfaat ditempatkan sebagai tema yang perlu dibaca bersama pertumbuhan.	Memperbarui indikator investasi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan sesuai ketersediaan data untuk bahan peninjauan berkala.

Sumber: sintesis penulis atas paparan dan tema diskusi yang dilaporkan dalam kegiatan. Kelompok isu tidak menunjukkan peringkat. Arah tindak lanjut merupakan usulan penulis, bukan rekomendasi formal yang telah disahkan peserta.

5. Luaran Kegiatan dan Batas Bukti Manfaat

Luaran yang dapat dilaporkan meliputi paparan berbasis data resmi, pertukaran perspektif akademik dan pengalaman kelembagaan, serta sintesis isu yang menghubungkan pertumbuhan, fiskal, perbankan, dunia usaha, dan kesejahteraan. Manfaat bagi peserta dijelaskan pada tingkat kesempatan belajar: forum memfasilitasi perbandingan indikator, membuka ruang interpretasi bersama, dan menghasilkan pertukaran pengetahuan lintas institusi. Tabel 3 memperjelas hubungan antara dokumentasi kegiatan, manfaat yang dapat dideskripsikan, dan batas penafsirannya. Dokumentasi foto menunjukkan konteks pelaksanaan dan interaksi; foto tidak membuktikan peningkatan pengetahuan, kepuasan, atau penerapan hasil dalam pekerjaan peserta.

Kendala utama ialah kegiatan berlangsung satu hari dan belum dilengkapi pengukuran awal dan akhir ataupun penelusuran penggunaan pengetahuan pada tingkat kelembagaan. Selain itu, perbedaan cakupan data "Papua" berpotensi menimbulkan perbandingan yang tidak setara jika definisi wilayah dan periode tidak dinyatakan. Oleh karena itu, simpulan dibatasi pada proses dan luaran dokumentatif. Deskripsi kegiatan dapat menjadi rujukan untuk merancang forum serupa, sedangkan efektivitasnya terhadap pengetahuan, perilaku, dan koordinasi kebijakan masih perlu dinilai.

Tabel 3. Dokumentasi Proses dan Batas Penafsiran Manfaat

Proses atau Luaran	**Dokumentasi Yang Dilaporkan**	**Manfaat Yang Dapat Dideskripsikan dan Batasnya**
Fasilitasi pembacaan data	Paparan indikator dan pembahasan definisi, cakupan wilayah, serta periode.	Membuka ruang interpretasi bersama; tidak membuktikan peningkatan skor atau pemahaman individual.
Pertukaran perspektif lintas sektor	Keterlibatan pemerintah, perbankan, KADIN, akademisi, dan sesi tanggapan.	Memfasilitasi perbandingan data dan pengalaman; tidak membuktikan kesamaan pemahaman atau penguatan koordinasi.
Sintesis isu FGD	Tema pembahasan yang dirangkum penulis menjadi peta isu pada Tabel 2.	Menyediakan bahan pembahasan lanjutan; bukan keputusan formal atau bukti adopsi kebijakan.
Konteks pelaksanaan	Surat undangan dan dokumentasi foto kegiatan.	Menunjukkan konteks penyelenggaraan dan interaksi; tidak mengukur kepuasan, pengetahuan, atau perubahan perilaku.

Sumber: dokumentasi dan uraian kegiatan dalam naskah. Bukti proses dan luaran tidak diperlakukan sebagai bukti perubahan pengetahuan, perilaku, kapasitas kelembagaan, atau dampak pembangunan.

Diskusi

Proses FGD menunjukkan tersedianya ruang diseminasi informasi dan pertukaran perspektif. Kerangka *knowledge co-production* menjelaskan bahwa pengetahuan yang dapat digunakan lahir dari interaksi antara bukti ilmiah dan pengetahuan kontekstual (Norström et al., 2020). Kesempatan bagi peserta untuk

membandingkan statistik dengan pengalaman transaksi, pembiayaan, belanja, dan aktivitas usaha membuka ruang pemaknaan bersama. (Reed et al., 2018) menekankan bahwa keterlibatan yang efektif memerlukan komunikasi dua arah dan desain yang mempertimbangkan konteks institusional. Hal ini relevan di Papua karena indikator agregat dapat menyembunyikan ketimpangan spasial dan sektoral. (Andriaswati & Utami, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam menjelaskan kemiskinan, sedangkan (Titalessy et al., 2024) menekankan peran pendidikan, infrastruktur, pendapatan per kapita, dan kebijakan pengeluaran dalam pembangunan inklusif. Forum ini memfasilitasi pembacaan yang menghubungkan angka, konteks, dan implikasi; perubahan cara membaca data pada masing-masing peserta belum dapat dinilai dari evaluasi yang tersedia.

Pembahasan hubungan fiskal dan hasil pembangunan sejalan dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa besarnya masukan tidak otomatis menghasilkan hasil yang setara. (Fatahillah et al., 2021) menemukan bahwa dana otonomi khusus dapat memengaruhi pendapatan per kapita, tetapi belum otomatis memperkuat kapasitas pajak daerah. (Rumere et al., 2022) menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus belum otomatis menghasilkan perbaikan pendidikan dan kesehatan, sementara (Titalessy & Situmeang, 2024) memperlihatkan perbedaan efektivitas antarjenis transfer terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Di luar Papua, (M. I. D. Safitri et al., 2021) menemukan bahwa belanja fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dapat mendukung pertumbuhan inklusif dalam jangka panjang, sedangkan (Ernawati et al., 2021) menunjukkan bahwa dana desa dapat mendukung pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, tetapi belum tentu pemerataan. Temuan tersebut mendukung relevansi tema kualitas hasil dan pemerataan manfaat dalam FGD, selain pembahasan serapan anggaran.

Fungsi FGD sebagai ruang kolaborasi dapat dibahas melalui konsep *science-policy interface*. (Maas et al., 2022) menekankan interaksi dan pembagian tanggung jawab yang reflektif antara ilmuwan dan aktor kebijakan. (Goulart & Falanga, 2022) menunjukkan bahwa *co-production* dapat mendukung kualitas pengetahuan dan rasa memiliki, tetapi juga membawa risiko asimetri informasi serta dominasi aktor tertentu. Pada konteks Indonesia, (Haris et al., 2024; Sitepu & Maulana, 2021) membahas relasi kolaboratif antara pemerintah, sektor privat, komunitas, dan universitas dalam pembangunan lokal. Rancangan FGD ini memiliki unsur yang sejalan dengan prinsip kontekstual, plural, berorientasi tujuan, dan interaktif (Norström et al., 2020), serta dapat dibaca melalui kerangka *5Ws co-production* (Steiner et al., 2023). Namun, evaluasi terhadap pemerataan kesempatan berbicara, dominasi aktor, dan kepemilikan bersama atas rumusan akhir belum dilaporkan secara

sistematis. Karena itu, *knowledge co-production* digunakan sebagai kerangka untuk menafsirkan proses pertukaran pengetahuan, bukan sebagai klaim bahwa produk kebijakan bersama telah disahkan. Urutan paparan data acuan resmi, analisis akademik, tanggapan lintas sektor, dan sintesis isu dapat menjadi rujukan perancangan forum berikutnya.

Pembahasan *outlook* jangka pendek dan agenda pembangunan jangka panjang membuka ruang pembelajaran kebijakan. (Titalessy et al., 2024) menunjukkan bahwa pembangunan inklusif Papua berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, dan pendapatan, sedangkan (D. Safitri, 2024) membahas hubungan bantuan sosial dan pendidikan dengan kemiskinan melalui PDRB. Laporan (Bank Indonesia, 2024) juga menyajikan proyeksi dan risiko ekonomi yang relevan sebagai konteks *outlook*. Menempatkan proyeksi sebagai skenario memungkinkan pembahasan respons apabila asumsi berubah. Tema FGD memiliki keterkaitan dengan SDG 8 melalui pembahasan pertumbuhan produktif dan pembiayaan; SDG 10 melalui distribusi manfaat; SDG 16 melalui diskusi berbasis bukti; dan SDG 17 melalui interaksi lintas institusi. Keterkaitan ini bersifat tematik. Kegiatan satu hari dengan evaluasi dokumentatif belum cukup untuk menilai perubahan kapasitas kelembagaan ataupun kontribusi terukur terhadap pencapaian SDGs.

Usulan Tindak Lanjut dan Evaluasi Keberlanjutan

Dokumentasi kegiatan yang disajikan belum memuat bukti penerbitan catatan kebijakan (*policy note*), pelaksanaan forum lanjutan, atau pemantauan penggunaan hasil FGD. Oleh karena itu, keberlanjutan dirumuskan sebagai usulan tindak lanjut penulis. Tabel 4 menguraikan kegiatan, waktu indikatif, pelaksana yang diusulkan, dan luaran yang dapat diperiksa. Jadwal penyusunan ringkasan dan *policy note* dihitung sejak rencana disepakati oleh pihak yang bersedia terlibat, sedangkan pemantauan penggunaan dihitung sejak hasil dibagikan. Jadwal ini merupakan rancangan pengembangan, bukan catatan pelaksanaan setelah FGD 13 Desember 2024.

Tabel 4. Usulan Tindak Lanjut dan Evaluasi Keberlanjutan

Tahap dan Waktu Indikatif	Kegiatan Yang Diusulkan	Pelaksana Yang Diusulkan	Luaran Yang Dapat Diperiksa
Minggu 1-2 sejak rencana disepakati	Menelaah catatan tema dan paparan; memeriksa cakupan data; meminta	Tim penulis dan penyelenggara, dengan masukan	Ringkasan isu dengan jejak sumber, daftar koreksi, dan kebutuhan data.

Tahap dan Waktu Indikatif	Kegiatan Yang Diusulkan	Pelaksana Yang Diusulkan	Luaran Yang Dapat Diperiksa
	masukan atas ringkasan isu.	perwakilan peserta.	
Minggu 3-4 sejak rencana disepakati	Menyusun *policy note* berisi isu, bukti, pilihan tindak lanjut, dan kebutuhan koordinasi; membagikan setelah penelaahan.	Tim penulis dan penyelenggara yang bersedia terlibat.	Draf atau naskah *policy note* dengan status jelas; catatan distribusi jika sudah dibagikan.
Tiga bulan setelah hasil dibagikan	Menelusuri penerimaan, pembahasan, penggunaan hasil, dan hambatannya melalui umpan balik kelembagaan.	Penyelenggara dan penghubung lembaga peserta yang bersedia.	Rekap umpan balik dan contoh dokumen penggunaan bila tersedia.
Enam bulan sejak rencana disepakati, lalu semesteran jika disepakati	Meninjau perubahan indikator, membahas tindak lanjut, dan memperbarui agenda forum.	Penyelenggara bersama unsur peserta yang bersedia.	Ringkasan peninjauan, peta isu yang diperbarui, dan agenda berikutnya.
Sebelum dan sesudah forum berikutnya	Melaksanakan *pre-test* dan *post-test* singkat, lembar refleksi, serta pencatatan pertanyaan dan tanggapan.	Tim fasilitator dan penyelenggara yang disepakati.	Rekap jawaban berpasangan dan refleksi untuk evaluasi kegiatan berikutnya.

Pada kegiatan berikutnya, *pre-test* dan *post-test* dapat memuat pertanyaan tentang cakupan wilayah, periode, sumber data, dan penafsiran implikasi indikator. Jawaban sebelum dan sesudah kegiatan perlu dipasangkan pada peserta yang sama, dengan pelaporan jumlah pasangan data yang tersedia. Perbandingan ini dapat menggambarkan perubahan jawaban selama kegiatan; tanpa rancangan pembanding, hasilnya tidak otomatis membuktikan bahwa perubahan disebabkan oleh FGD.

Lembar refleksi digunakan untuk menghimpun penilaian peserta, sedangkan pemantauan tiga bulan menelusuri penggunaan hasil dengan contoh dokumen pendukung apabila tersedia. Instrumen tersebut tidak diterapkan secara retrospektif untuk menyatakan peningkatan pengetahuan pada FGD 2024.

Rancangan tindak lanjut ini memperjelas apa yang akan dihasilkan, siapa yang diusulkan terlibat, dan kapan hasil ditinjau sebagaimana ditekankan dalam kerangka *5Ws co-production* (Steiner et al., 2023). Pemantauan juga memberi ruang untuk menilai kualitas interaksi dan penggunaan pengetahuan, selaras dengan perhatian terhadap proses partisipasi dalam (Reed et al., 2018). Pelaksanaannya memerlukan kesepakatan pihak yang terlibat dan ketersediaan sumber daya.

Kesimpulan

FGD *Review* Perekonomian Papua 2024 dan *Outlook* Perekonomian Papua 2025 memfasilitasi pembacaan data ekonomi regional dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah, perbankan, KADIN, akademisi, serta institusi terkait. Luaran yang disajikan berupa sintesis enam kelompok isu: cakupan dan periode data; sumber pertumbuhan, inflasi, dan risiko *outlook*; kualitas belanja dan distribusi manfaat; kredit, pembiayaan UMKM, dan aktivitas usaha; diversifikasi, sumber daya manusia, dan konektivitas; serta investasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pembangunan inklusif. Peta isu tersebut merupakan sintesis dokumentatif penulis yang dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan. Evaluasi yang tersedia mendukung uraian tentang fasilitasi interpretasi dan pertukaran perspektif, tetapi belum mendukung kesimpulan mengenai peningkatan pengetahuan peserta atau penggunaan hasil dalam kebijakan.

Proses dialog dapat ditafsirkan melalui kerangka *knowledge co-production* dan *science-policy interface*, dengan tetap membedakan pertukaran pengetahuan dari pengesahan produk kebijakan bersama. Tindak lanjut yang diusulkan meliputi penelaahan ringkasan isu dan kamus data, penyusunan *policy note*, pemantauan tiga bulan setelah hasil dibagikan, serta forum peninjauan semesteran apabila disepakati. Forum berikutnya juga dapat menggunakan *pre-test* dan *post-test* serta lembar refleksi. Rancangan tersebut menyediakan arah pengembangan koordinasi ekonomi regional yang berbasis bukti (*evidence-based*), sementara pelaksanaan dan manfaat lanjutannya masih perlu didokumentasikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua atas undangan, fasilitasi, paparan awal, dan

penyelenggaraan FGD. Apresiasi disampaikan kepada peserta dari unsur perbankan, KADIN, pejabat dan analis instansi pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan lain yang berkontribusi dalam diskusi. Terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Yapis Papua dan Universitas Cenderawasih atas dukungan terhadap peran akademisi dalam diseminasi pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Referensi

Andriaswati, E., & Utami, S. (2022). Determinants of Poverty Rates in Papua Province in 2011 - 2019. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *5*(1), 1453–1467. https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.50928

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan IV-2024*. Berita Resmi Statistik. https://papua.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/06/1072/pertumbuhan-ekonomi provinsi-papua-triwulan-iv-2024.html

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Papua November 2024*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/pages/ laporan-perekonomian-provinsi-papua-november-2024.aspx

Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, *9*(4), 164. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/economies9040164

Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(4), 345–359. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.429

Goulart, P., & Falanga, R. (2022). Co-production and Voice in Policymaking: Participatory Processes in the European Periphery. *The European Journal of Development Research*, *34*(4), 1735–1744. https://doi.org/10.1057/s41287-022-00551-z

Haris, R. A., Suryono, A., Said, A., & Rozikin, M. (2024). Collaborative Governance in Local Economic Development: the Case in East Java, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(1), e2501. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2501

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. (2024). *Surat Nomor S-10/WPB.34/WPB.343/2024 tentang permohonan narasumber kegiatan FGD Review Perekonomian Papua 2024 dan Outlook Perekonomian Papua 2025*.

Maas, T. Y., Pauwelussen, A., & Turnhout, E. (2022). Co-producing the science–policy interface: towards common but differentiated responsibilities. *Humanities and Social Sciences Communications*, *9*(1), 93. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01108-

5

Norström, A. V, Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., Bednarek, A. T., Bennett, E. M., Biggs, R., & de Bremond, A. (2020). Principles for knowledge co-production in sustainability research. *Nature Sustainability*, *3*(3), 182–190. https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41893-019-0448-2

Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, *26*(S1), S7–S17. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rec.12541

Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *JEJAK*, *15*(1), 114–138. https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301

Safitri, D. (2024). The Influence of Social Assistance and Education on Poverty Rates through GRDP in Papua Province in 2018-2022. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *7*(1), 1–9. https://doi.org/10.15294/efficient.v7i1.4827

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(2), 85–96. https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339

Saktina, R., & Khoirunnurrofik, K. (2022). The Effect of Geographical Conditions on the Role of the Special Autonomy Fund for the Availability of Road Infrastructure in Papua. *Jurnal Bina Praja*, *14*(1), 111–122. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.111-122

Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *47*(1), 80–90. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1438

Steiner, A., Farmer, J., Yates, S., Moran, M., & Carlisle, K. (2023). How to systematically analyze co-production to inform future policies? Introducing 5Ws of co-production. *Public Administration Review*, *83*(3), 503–521. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13571

Titalessy, P. B., & Situmeang, R. J. (2024). Analysis of Government Expenditure on Inclusive Economic Development in Papua. *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science*, *5*(4), 1181–1198. https://doi.org/10.38142/ijesss.v5i4.1135

Titalessy, P. B., Situmeang, R. J., Mulyono, H. I., & Patty, R. (2024). Analysis of Inclusive Economic Development and Its Driving Factors in Papua Province. *Society*, *12*(2), 758–775. https://doi.org/10.33019/society.v12i2.743